

Kebijakan Pendidikan untuk Peningkatan Jumlah Siswa SMK di Indonesia: Isi Kebijakan dan Dampaknya di Kota Malang Provinsi Jawa Timur

Fatah Nasikh Aryawan

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

*E-mail: fatah@smkn6malang.sch.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan isi kebijakan pendidikan peningkatan jumlah siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia, dan melaporkan dampak kebijakan tersebut di Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan peningkatan jumlah siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia, khususnya yang dilaksanakan di Kota Malang. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muatan kebijakan atau muatan kebijakan tertuang dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah Tahun 2004-2009 (Renstra Depdiknas) serta dalam tiga surat perhatian Depdiknas tahun 2006, 2007, dan 2008. Isi kebijakan disusun dan dirinci secara jelas dalam bahasa sederhana sehingga pelaksana kebijakan dapat dengan mudah menginterpretasikan dan menyusun tujuan kebijakan yang dituangkan dalam langkah-langkah teknis implementasi. Kebijakan pendidikan untuk meningkatkan jumlah siswa SMK yang dilaksanakan di Kota Malang telah berjalan cukup baik dengan sasaran yang berhasil dicapai, dan telah menghasilkan beberapa dampak kebijakan baik positif maupun negatif.

Keywords: Kebijakan Pendidikan, Isi Kebijakan, Dampak Kebijakan, Pendidikan Vokasi, SMK Sekolah



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Pada era global sekarang berbagai bangsa di dunia telah mengembangkan Knowledge-Based Economy (KBE), yang mensyaratkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Kerena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan - Education for the Knowledge Economy (EKE) (Departemen Pendidikan Nasional, 2006). Dalam konteks ini, lembaga pendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung KBE. Ketersediaan SDM bermutu yang menguasai IPTEK sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetisi global dan ekonomi pasar bebas, yang menuntut daya saing tinggi sehingga pendidikan diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia meraih keunggulan dalam persaingan global.

Analisis situasi pada Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa pada kurun sepuluh tahun terakhir telah terjadi

kemerosotan kualitas SDM Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menurun sejak tahun 1995, yaitu peringkat ke-104 pada tahun 1995, ke-109 pada tahun 2000, ke-110 pada tahun 2002, ke-112 pada tahun 2003, sedikit membaik menjadi peringkat ke-111 pada tahun 2004, dan peringkat ke-110 pada tahun 2005. Kemunduran tersebut lebih banyak disebabkan oleh indikator penurunan kinerja perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997.

Lebih lanjut, Djojohadikusumo dalam (Mudyahardjo, 2001) menjelaskan definisi pembangunan ekonomi yang diacu di atas sebagai suatu proses perubahan struktur produksi (pendapatan nasional), struktur penduduk dan mata pencaharian (lapangan kerja) dan struktur lalu lintas barang, jasa, dan modal dalam hubungan internasional. Persoalannya, dalam konteks proses perubahan struktur penduduk dan mata pencaharian (lapangan kerja), pertumbuhan angkatan kerja Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas ternyata tidak seimbang dengan kesempatan kerja dan tuntutan kualifikasi tenaga kerja. Apalagi, kondisi krisis multi dimensi dewasa ini mengakibatkan bertambahnya pengangguran dan persaingan tenaga kerja yang semakin membutuhkan penanganan serius.

Terkait masalah pengangguran, (Habib, 2017) menggambarkan data nasional sampai tahun 2001 bahwa terdapat 43,4% lulusan SLTP yang tidak melanjutkan ke SLTA, dan 88,4% lulusan SLTA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya, sebagian besar lulusan SLTA tersebut menjadi angkatan kerja baru. Kelompok ini perlu mendapat perhatian agar tidak semakin menambah jumlah pengangguran yang semakin besar. Selain itu, tuntutan atas perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar, sebagai dampak Program Wajib Belajar 9 Tahun, mengakibatkan semakin bertambahnya partisipasi pada pendidikan menengah. Sampai tahun 2004, APS penduduk usia 16-18 tahun sudah mencapai 53,5%. Meningkatnya partisipasi pendidikan menengah menimbulkan tekanan baik pada penyediaan kesempatan belajar di pendidikan tinggi maupun pada upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah agar para lulusannya dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Pada pendidikan tinggi, partisipasi jumlah penduduk usia 19-24 tahun yang memperoleh kesempatan belajar di perguruan tinggi masih relatif kecil. Pada tahun 2004, Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi baru mencapai 14,6% (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

Selaras angka lulusan SLTA yang melanjutkan ke perguruan tinggi di atas, data BPS tahun 2007 juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Dalam hal ini, jumlah pengangguran yang berasal bukan dari lulusan perguruan tinggi. Menurut BPS, pada Agustus 2007 pengangguran yang berasal bukan berasal dari lulusan perguruan tinggi mencapai angka 90,30% dari jumlah total pengangguran di Indonesia yang mencapai 10,01 juta (<http://www.ui.edu> diakses pada 12 Oktober 2008).

Menurut (Sriyono, 2005) tingkat keterserapan angkatan kerja masih sangat rendah, yaitu sekitar 5,34% dari kesempatan kerja yang ada; (2) proporsi angkatan kerja masih didominasi oleh kategori tingkat pendidikan rendah; dan (3) jumlah penganggur terbesar berasal dari kelompok lulusan SLTA sebanyak (48,70%).

Simpulan tersebut dibenarkan oleh laporan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) propinsi Jawa Timur terbaru 38 kabupaten/ kota se-Jawa Timur yang memperlihatkan bahwa dari jumlah lowongan sebanyak 1.655 yang tersedia hingga Juli 2006, tidak terpenuhi oleh pencari kerja dikarenakan kualifikasi dan standarisasi variatif dari perusahaan. Dari jumlah pendaftar sebanyak 2.193 orang, hanya tertampung pada penempatan sebanyak 114 orang atau sekitar 5,19%.

Hal itu mengandung konsekuensi logis bahwa segenap unsur pemerintah di Jawa Timur sudah semestinya terus berupaya merumuskan kebijakan yang mampu memecahkan: (a) persoalan keterserapan di dunia kerja dengan program pemberdayaan kemandirian (wirausaha), sehingga angkatan kerja tidak terlalu bergantung pada jumlah lowongan yang disediakan dunia usaha/ industri; (b) persoalan tingginya angka pengangguran yang tidak terdidik dengan program pemberdayaan keterampilan hidup di jalur luar sekolah, sehingga mampu berkarya meski tingkat pendidikan rendah dan telah melewati usia belajar; dan (c) persoalan kendala lulusan SLTA dalam

memenuhi tuntutan dunia kerja (bagi yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi) dalam jangka pendek dengan memberi pelatihan keterampilan dan wirausaha, serta dalam jangka panjang menyediakan lebih banyak pilihan program pendidikan formal dengan daya tampung memadai yang mempersiapkan peserta didik lebih siap bekerja dan mandiri. Bahkan, data BPS menyebutkan bahwa jumlah pengangguran terbuka di Jawa Timur telah mencapai 846.458 orang, bahkan pada tahun 2006 jumlah angkatan kerja semakin meningkat sekitar 1 juta jiwa (Amir, 2007).

Dalam perspektif pembangunan ekonomi pendidikan harus menghasilkan manusia-manusia yang handal untuk menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi nasional (Subri, 2003). Oleh karena itu, pendidikan dituntut mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutu yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keterampilan teknis, serta kecakapan hidup yang memadai. Pendidikan juga harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kewirausahaan, yang menjadi salah satu pilar utama aktivitas perekonomian nasional (Marsidin, Sufyarma & Elizar Ramli, 2019). Bahkan peran pendidikan menjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun kemandirian bangsa, yang menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan antar bangsa di era global.

Peningkatan output pada masyarakat miskin dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas produksi. Kapasitas produksi ini ditingkatkan melalui perbaikan modal manusia dan bukan pada penambahan modal fisik semata (Imania, 2019). Modal fisik dapat ditambah jika modal manusia telah meningkat. Pada masyarakat miskin, SDM adalah jenis sumber daya yang paling mudah didapatkan. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan berbagai bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan sebagai upaya meningkatkan mutu modal manusia. Dengan peningkatan mutu modal manusia, maka masyarakat miskin akan mampu menaikkan output-nya. (Fattah, 2004) berpendapat bahwa "nilai modal manusia (human capital) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar (labour intensive), akan tetapi sangat ditentukan pula oleh tenaga kerja intelektual (brain intensive)".

Kualitas atau mutu SDM merupakan keharusan bagi upaya pembangunan suatu bangsa guna kemapanan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan modernisasi peradaban. Untuk mengantisipasi pengangguran demi meraih keunggulan tersebut, maka UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Kemdikbud, 2003) telah mengelompokkan jalur pendidikan menengah ke dalam dua jenis, yaitu pendidikan menengah umum yang ditujukan guna perluasan pengetahuan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, serta pendidikan menengah kejuruan yang dipersiapkan agar peserta didik dapat bekerja dalam bidang tertentu. SMK dituntut berperan optimal sebagai lembaga pencetak tenaga kerja terampil sebagai solusi dari persoalan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia (Omenka, J. E. & Otor, 2015).

Relevan dengan UU Sisdiknas tersebut, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009 pun merumuskan sejumlah sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan dalam Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, yang diantaranya perihal pengembangan Pendidikan kejuruan.

Saat ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja menengah di sektor manufaktur, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, perdagangan, jasa kemasyarakatan, pariwisata, ICT, pertanian, serta teknologi dan seni (konservatori budaya), pemerintah akan meningkatkan jumlah peserta didik SMK, yang diproyeksikan akan meningkat secara signifikan sampai dengan tahun 2009. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peningkatan jumlah SMK secara proporsional termasuk upaya penataan bidang keahlian dan program studi di SMK serta fasilitas magang agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja (Setiadi, 2016). Penataan ini dilakukan agar lulusan sekolah menengah kejuruan dapat makin memadai untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

(Hasbullah, 2006) mengemukakan bahwa sekolah-sekolah yang sulit mempertanggungjawabkan program-programnya akan ditinggalkan masyarakat karena dinilai tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat. Sebaliknya, sekolah sudah semestinya memiliki daya tarik, daya

saing, dan daya tahan. Apabila sekolah memiliki daya tarik, daya saing, dan daya tahan, maka pemberdayaan sekolah dapat dilaksanakan secara optimal karena masih diminati oleh masyarakat. Bahkan ditegaskan bahwa sekolah-sekolah yang tidak memiliki daya tarik, daya saing, dan daya tahan sebaiknya ditutup demi menghindari kerugian di pihak masyarakat sebagai konsumen pendidikan.

Oleh karena itu, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah kejuruan dilakukan dengan mengembangkan program studi atau jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, antara lain: teknologi pengolahan dan pengemasan makanan, teknologi otomotif modern, telematika, hotel dan restoran, bidang kelautan, seni etnik dan kerajinan, industri manufaktur, serta teknologi pertanian nilai tinggi (Widiani, 2015). SMK di setiap daerah juga didorong untuk mengembangkan program studi yang berorientasi pada keunggulan lokal, baik pada aspek keterampilan maupun kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan akan diberikan untuk membekali lulusan SMK mampu mengembangkan sendiri lapangan kerja bagi dirinya (Ali, 2017). Pengembangan kecakapan berwirausaha akan dilakukan seluas-luasnya untuk mendorong tumbuhnya wiraswastawan sebanyak-banyaknya, yang selain menjadi wahana kemandirian berusaha bagi pelaku-pelakunya, juga memberikan dampak makro yang sangat positif bagi pengembangan ekonomi nasional (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

Atas dasar pemikiran yang telah diuraikan di atas, peneliti melakukan analisis kebijakan peningkatan jumlah siswa SMK di Kota Malang sebagai lokasi penelitian. Penetapan lokasi dan fokus-fokus penelitian ini dilandaskan pada beberapa temuan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti mulai tahun 2008 sampai dengan pertengahan 2010.

Metode

Penelitian kebijakan peningkatan jumlah siswa sekolah menengah kejuruan dan dampaknya di Kota Malang ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian berlangsung dari tahun 2007 sampai dengan 2011. Sumber data yang dikumpulkan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan yang meliputi tiga dokumen utama, yaitu: (1) Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009 (RPPNJM/RPJM), dan (2) Tiga Surat Edaran Depdiknas (Mendiknas dan Dirjen Mandikdasmen), yang terdiri dari: (a) Surat Mandikdasmen Nomor:

3799/C.C5/MN/2006 tertanggal 19 Juli 2006 tentang Peningkatan Jumlah Siswa SMK sesuai Renstra Diknas 2006-2009, (b) Surat Mendiknas Nomor: 14/MPN/HK/2007 tertanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah, dan (c) Surat Dirjen Mandikdasmen Nomor: 1957/C.C5/TU/2008 tertanggal 16 Mei 2008 tentang Langkah-langkah Strategis untuk Mendorong Pertumbuhan Jumlah Siswa SMK.

Data penelitian ini juga diambil dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan para narasumber yang merupakan pemangku kepentingan kebijakan, baik itu yang terlibat pada tahap formulasi maupun implementasi di tingkat pusat maupun daerah (Situmorang, M, & Situmorang, 2014). Di samping itu, observasi berperanserta pun dilakukan dengan mengunjungi dan tinggal di situs penelitian lapangan, yaitu: beberapa SMK di kota Malang, kantor Pengawas, dan kantor Dinas Pendidikan Kota Malang secara berulang-ulang. Dalam tahap analisis data, penelitian ini menggunakan tiga tahap analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam hal pengecekan keabsahan data, peneliti memegang prinsip konfirmabilitas dan dependabilitas.

Hasil dan Pembahasan

1. Rumusan Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK di Kota Malang

Rumusan atau isi kebijakan pertama sekali dapat ditelusuri dari dokumen Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 "Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025" (Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah).

Sebagai pedoman bagi penentuan penekanan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah (RPJM), sebelumnya disusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPJP). Hal itu dimaksudkan guna memastikan tercapainya visi dan misi Depdiknas dengan penurunan program kerja yang realistis, terintegrasi dan berkesinambungan.

Dengan visi “Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025” Depdiknas menggunakan empat tema strategis pembangunan pendidikan dalam RPJP 2005-2025, yaitu: “(1) peningkatan kapasitas dan modernisasi (periode 2005-2009), (2) penguatan pelayanan (periode 2010-2015), (3) daya saing regional (periode 2015-2020), dan (4) daya saing internasional (periode 2020-2025)”.

Pada Periode 2005-2009 dengan tema strategis Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan daya tampung Dinas pendidikan maupun satuan Pendidikan yang ada. Fokus pembangunan tersebut didasarkan pada analisis situasi bahwa kebutuhan (demand) dengan sediaan (supply) sarana dan prasarana pendidikan masih sangat kurang. Terlebih jika dibandingkan antara pola sebaran penduduk Indonesia dan keberadaan infrastruktur pendidikan yang masih menuntut perhatian lebih. Bila telah terjadi keseimbangan yang efektif antara kuantitas manusia Indonesia dengan kapasitas pendidikan nasional maka poin utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah tercapai.

Dengan titik tekan pada kapasitas dan modernisasi, diharapkan pemerataan akses Pendidikan ke seluruh lapisan masyarakat dan ke seluruh pelosok negeri akan mempertinggi APS dan mengurangi angka buta aksara sehingga IPM Indonesia akan semakin baik. Depdiknas memiliki 15 program pembangunan pendidikan, terdiri dari 10 program Fungsi Pendidikan dan lima program Fungsi Pelayanan Pemerintahan Umum dan Fungsi Perlindungan Sosial. Adapun salah satu diantara 10 jenis program Fungsi Pendidikan adalah Program Pendidikan Menengah yang menggariskan tentang pendidikan kejuruan (SMK).

Program pendidikan menengah bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi semua penduduk, laki-laki dan perempuan, melalui pendidikan formal: SMA, SMK, MA, Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Menurut Renstra Depdiknas 2005-2009 dijelaskan bahwa program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun sekolah/madrasah kejuruan dan pendidikan nonformal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.

Selanjutnya dijelaskan dalam dokumen Renstra Depdiknas 2005-2009 bahwa setiap tema strategis pembangunan pendidikan jangka panjang diatas akan diturunkan dalam program kerja departemen sesuai kebijakan pembangunan jangka menengah yang akan menekankan pada 3 tantangan utama, yaitu: (1) pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah, salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah adalah meningkatkan jumlah peserta didik SMK, yang diproyeksikan akan meningkat secara signifikan sampai dengan tahun 2009. Hal tersebut disebutkan dengan maksud dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja menengah di sektor manufaktur, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, perdagangan, jasa kemasyarakatan, pariwisata, ICT, pertanian, serta teknologi dan seni (konservatori budaya).

Sedangkan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah kejuruan dilakukan dengan mengembangkan program studi/ jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, antara lain: teknologi pengolahan dan pengemasan makanan, teknologi otomotif modern, telematika, hotel dan restoran, bidang kelautan, seni etnik dan kerajinan, industri manufaktur, serta teknologi pertanian nilai tinggi. SMK di setiap daerah juga didorong untuk mengembangkan

program studi yang berorientasi pada keunggulan lokal, baik pada aspek keterampilan maupun kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan akan diberikan untuk membekali lulusan SMK mampu mengembangkan sendiri lapangan kerja bagi dirinya. Pengembangan kecakapan berwirausaha akan dilakukan seluas-luasnya untuk mendorong tumbuhnya wiraswastawan sebanyak-banyaknya, yang selain menjadi wahana kemandirian berusaha bagi pelaku-pelakunya, juga memberikan dampak makro yang sangat positif bagi pengembangan ekonomi nasional.

Selanjutnya, pembangunan pendidikan menengah dalam kaitan Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik dilakukan dalam kerangka sistem dan mekanisme isu-isu partisipasi masyarakat, MBS (DP/KS), pengembangan kapasitas, dan pengembangan EMIS. Perluasan partisipasi masyarakat akan didorong lebih luas dengan melibatkan dunia usaha dan industri dalam pengelolaan pendidikan kejuruan.

Adapun dalam lampiran Renstra yang menerangkan uraian Sasaran Pembangunan, Kegiatan Pokok Pembangunan, dan Ukuran Kinerja Kunci Dirjen MPDM tercantum sejumlah hal terkait kebijakan SMK, diantaranya yang linier tentang kebijakan peningkatan atau pertumbuhan jumlah siswa SMK, berikut ini: Sasaran Pembangunan: "Penciptaan lapangan kerja, lulusan mendapatkan pekerjaan, dan melanjutkan", dengan Kegiatan Pokok Pembangunan: "Program peningkatan rasio jumlah lulusan SMK : SMA", dan pada Ukuran Kinerja Kunci, tertulis: "Rasio jumlah SMA : SMK = 50% : 50%" dan "Lulusan SMK menciptakan lapangan kerja (20%), mendapat pekerjaan (DN 50%, LN 10%), dan melanjutkan 20%.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa RPJM yang menjadi acuan kebijakan pendidikan nasional telah mencantumkan bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pemerintah meningkatkan jumlah peserta didik SMK, yang diproyeksikan akan meningkat secara signifikan sampai dengan tahun 2009 dengan maksud memenuhi kebutuhan tenaga kerja menengah. Selaras dengan hal tersebut, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah kejuruan dilakukan dengan mengembangkan program studi/jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, SMK di setiap daerah juga didorong untuk mengembangkan program studi yang berorientasi pada keunggulan lokal, baik pada aspek keterampilan maupun kewirausahaan.

Secara lebih teknis, dapat disarikan dua ukuran kinerja kunci kebijakan dalam RPJM yang menjadi komponen kebijakan peningkatan jumlah siswa SMK adalah: (1) pada tahun 2009 rasio jumlah SMA: SMK diharapkan telah mencapai angka 50% : 50%; dan (2) pada tahun 2009 80% dari peserta ujian nasional mendapatkan skor 6,00. Dengan demikian, target kebijakan pendidikan nasional dalam dokumen RPJM (2005-2009) adalah pencapaian rasio jumlah SMA: SMK (jumlah siswa) di Indonesia diharapkan telah mencapai angka 50% : 50%, dengan 80% dari peserta ujian nasional mendapatkan skor 6,00 pada tahun 2009.

Sedangkan isi atau rumusan kebijakan berdasarkan surat-surat edaran Dirjen dan Menteri pada dasarnya adalah langkah-langkah strategi pencapaian kebijakan yang terangkum ke dalam 10 butir muatan kebijakan (implementatif), sebagai berikut: (1) tidak ada pembatasan jumlah lulusan SMP/MTs dan yang sederajat yang akan melanjutkan studi ke SMK baik negeri maupun swasta (peningkatan jumlah siswa SMK dan pembatasan jumlah siswa SMA); (2) pengoptimalan sumber daya sekolah untuk meningkatkan jumlah penerimaan siswa baru dengan cara menerapkan jadwal pembelajaran double shift; (3) tidak mengorbankan kualitas atau mutu program dan kegiatan pembelajaran di SMK demi peningkatan jumlah siswa; (4) pelaksanaan pembelajaran secara sungguh- sungguh sesuai kalender pendidikan; (5) pendidikan dilakukan dengan metode pembelajaran yang menyenangkan; (6) larangan memulangkan siswa sebelum jam sekolah selesai, misalnya dikarenakan kekosongan suatu mata pelajaran; (7) pelaksanaan pencitraan SMK antara lain melalui berbagai promosi dan kegiatan ekstrakurikuler; (8) pelaksanaan kerjasama Depdiknas dengan pemerintah daerah dalam penambahan unit SMK baru di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia; (9) pemberian subsidi pembangunan ruang

kelas baru, revitalisasi, dan penambahan peralatan pendidikan di SMK oleh Depdiknas; dan (10) pemberian beasiswa bagi siswa SMK oleh Depdiknas dan pemerintah daerah.

Pembuatan kebijakan diatas sesuai dengan pendapat (Slamet, 2016) yang mendefinisikan kebijakan sebagai suatu proses politik dimana kebutuhan, maksud, dan harapan diterjemahkan menjadi suatu rangkaian tujuan, peraturan, kebijakan, dan program, yang pada gilirannya berpengaruh pada alokasi sumber daya, tindakan, hasil, yang menjadi dasar evaluasi, perubahan, dan kebijakan- kebijakan baru.

Sebagaimana definisi (Slamet, 2016) kebijakan peningkatan jumlah siswa SMK tidak terlepas dari berbagai rangkaian “proses politik” yang berkaitan satu dengan yang lain. Hal itu tergambar contoh mulai dari diangkatnya Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A, seorang pakar ekonomi, sebagai Mendiknas oleh presiden yang notabene adalah pejabat politik sampai pada tataran teknis kebijakan level daerah sebagai misal, mekanisme persetujuan DPRD terhadap MoU penetapan anggaran BOS SLTA sebagai sumber dana beasiswa SMK. Lebih lanjut, “kebutuhan, maksud, dan harapan” yang dimaksud oleh Cooper, dkk dalam konteks kebijakan SMK adalah hasil analisis terhadap lingkungan strategis sosial ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Oleh karena itu, analisis lingkungan strategis di atas kemudian diterjemahkan ke dalam “serangkaian tujuan, peraturan, kebijakan, dan program” penguatan SMK, khususnya peningkatan jumlah siswa SMK sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RPJM 2005-2009 (Renstra Depdiknas), yang kemudian diperkuat dengan tiga surat edaran Depdiknas yang ditujukan kepada pemerintah daerah tentang: (1) Peningkatan Jumlah Siswa SMK sesuai Renstra Diknas 2006-2009 (Tahun 2006), (2) Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah (Tahun 2007); dan (3) Langkah-langkah Strategis untuk Mendorong Pertumbuhan Jumlah Siswa SMK (Tahun 2008).

2. Dampak Implementasi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK di Kota Malang

Dampak kebijakan nasional ini di kota Malang terkategori ke dalam dampak bagi tiga kelompok pemangku kepentingan pendidikan yang terkena kebijakan, yaitu: (a) SMK, (b) Dinas Pendidikan Kota Malang, dan (c) Masyarakat. Selain itu, dampak kebijakan pun dibagi menjadi dua jenis, yakni (a) dampak positif dan (b) dampak negatif.

Dampak positif kebijakan bagi SMK baik swasta maupun negeri di kota Malang adalah (1) partisipasi DUDI dalam Pendidikan Sistem Ganda meningkat; (2) kapasitas manajemen sekolah dan fungsi manajerial kepala sekolah berkembang; (3) tumbuh suburnya Teaching Factory di SMK kota Malang.

Dampak negatif kebijakan bagi kalangan SMK adalah: (1) alokasi waktu minimal jam tatap muka yang tidak terpenuhi; (2) durasi waktu pembelajaran yang tidak memenuhi target KTSP dan pelaksanaan Prakerin yang terlalu lama; (3) sarana/ prasarana di beberapa SMK negeri yang tidak sebanding dengan kebutuhan, dan pemborosan pemanfaatan peralatan praktik untuk pembelajaran di beberapa SMK swasta akibat merosotnya jumlah siswa; (4) kesulitan guru-guru SMK swasta yang telah tersertifikasi dalam memenuhi beban tugas mengajar minimal 24 jam per minggu; (5) menurunnya motivasi kerja guru-guru pada dua SMAN yang dialihfungsikan menjadi SMKN; (6) pelaksanaan alih spesialisasi guru tanpa disertai program penyiapan yang semestinya; (7) merosotnya jumlah siswa SMK swasta di kota Malang secara drastis; (8) keterkejutan guru SMK hasil alih fungsi dalam menghadapi kecenderungan perilaku siswa SMK; (9) program keahlian yang gagal dibuka di SMK baru alih fungsi; dan (10) resistensi warga sekolah yang dialihfungsikan terhadap kebijakan alih fungsi SMK.

Pada sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Malang terdampak secara positif dalam hal: (1) penilaian positif dan kepercayaan yang meningkat dari Direktorat PSMK kepada kota Malang; dan (2) meningkatnya minat pelamar CPNS untuk formasi guru SMK, meski pun juga terdampak negatif berupa timbulnya konflik antara SMK swasta versus Dinas Pendidikan Kota Malang dan SMK-SMK negeri.

Kelompok terdampak yang terakhir di dalam penelitian ini adalah masyarakat. Masyarakat diketahui terdampak kebijakan peningkatan jumlah siswa SMK dalam hal: (1) DUDI di Kota Malang diuntungkan dengan meningkatnya jumlah siswa yang mengikuti Prakerin; (2) DUDI di luar kota Malang menikmati kelebihan jumlah lulusan SMK dari kota Malang; (3) jumlah siswa miskin yang mendapat layanan pendidikan berkualitas meningkat; (4) mendukung peningkatan pendapatan perkapita penduduk, pertumbuhan ekonomi dan IPM Kota Malang; dan (5) tingginya prosentase jumlah lulusan SMK yang bekerja dan melanjutkan studi.

Namun demikian, masyarakat khususnya kalangan DUDI pun terkena dampak negatif karena adanya (1) beban biaya tambahan yang harus ditanggung orang tua/ wali siswa selama Prakerin; dan (2) siswa Prakerin yang kurang siap atau tidak kompeten menjadi beban pihak DUDI.

Kesimpulan

Rumusan atau isi kebijakan secara umum dapat ditelusuri dari dokumen Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 “Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025” yang disebut juga Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah. Muatan kebijakan pertumbuhan jumlah siswa SMK menuju perbandingan SMK: SMA 70%: 30% kemudian diperkuat dengan penerbitan tiga surat edaran Depdiknas yang ditujukan kepada pemerintah daerah tentang: (1) Peningkatan Jumlah Siswa SMK sesuai Renstra Diknas 2006-2009 (Tahun 2006); (2) Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah (Tahun 2007); dan (3) Langkah-langkah Strategis untuk Mendorong Pertumbuhan Jumlah Siswa SMK (Tahun 2008).

Adapun dampak kebijakan peningkatan jumlah siswa SMK secara nasional yang diimplementasikan di Kota Malang terkategori ke dalam dampak bagi tiga kelompok pemangku kepentingan pendidikan, yaitu: (a) SMK, (b) Dinas Pendidikan Kota Malang, dan (c) Masyarakat. Selain itu, dampak kebijakan pun dibagi menjadi dua jenis, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak kebijakan bagi SMK dan Dinas Pendidikan yang berhasil diungkap penelitian ini diantaranya, adalah: (1) partisipasi DUDI dalam pendidikan sistem ganda meningkat; (2) perkembangan secara pesat kapasitas manajemen sekolah dan fungsi manajerial kepala sekolah; (3) tumbuh suburnya Teaching Factory di SMK kota Malang; dan (4) penilaian positif dan kepercayaan yang meningkat dari Direktorat PSMK kepada Kota Malang; serta (5) peningkatan minat pelamar CPNS untuk formasi guru SMK

References

- Ali, M. (2017). *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Amir, T. (2007). *Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning: Bagaimana Pendidik Memberdayakan Pemelajar di Era Pengetahuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (2006). Indonesia. Depdiknas. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Sekolah Menengah Atas, Pub. L. No. 22 (2006) (2006). Indonesia.
- Fattah, N. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy.
- Habib, H. (2017). Study Of Teacher Effectiveness and Its Importance. *National Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(2).
- Hasbullah. (2006). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Imania, K. A. N. (2019). Rancangan Pengembangan Instrumen Penilaian Pembelajaran Berbasis

- Daring. *Jurnal PETIK*, 5(2), 31–47.
- Kemdikbud. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003) (2003). Indonesia.
- Marsidin, Sufyarma & Elizar Ramli, T. A. N. (2019). Pembinaan Kompetensi Manajerial dan Supervisi Kepala Sekolah. *Jurnal Halaqah*, 1(4).
- Mudyahardjo, R. (2001). *Pengantar pendidikan: sebuah studi awal tentang dasar-dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Omenka, J. E. & Otor, E. E. (2015). Influence of Classroom Management on Student's Achievement of Irania EFL Teacher's Attitudes. *Journal of Foreign Language Teaching & Research*, 3(5).
- Setiadi, H. (2016). Pelaksanaan Penilaian Pada Kurikulum 2013. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 20(2).
- Situmorang, M, & Situmorang, A. (2014). Efektivitas Modul Pembelajaran Inovatif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Pengajaran Laju Reaksi. *Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan*, 20(2), 139–147.
- Slamet, P. H. (2016). Kontribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 35(3), 301–311.
- Sriyono, dkk. (2005). *Teknik Belajar Mengajar dalam CBSA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subri, M. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Widiani, R. . (2015). Dampak Kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah Terhadap Pemerataan Pendidikan Jenjang Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–8.